

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Hubungan Internasional, banyak fenomena atau kejadian yang mewarnai dinamika Hubungan Internasional itu sendiri, dan fenomena itu tidak lain seperti konflik, perang, terorisme, nuklir, kemiskinan, HAM, wilayah dan hal lainnya. Di berbagai belahan dunia seperti Eropa, Asia, Amerika, Australia, dan negara lain - lainnya tentu mengalami fenomena - fenomena ini baik aktor bersifat individu, Negara, maupun sistem internasional itu sendiri. Seperti Perang melawan terorisme yang diusung Amerika, persengketaan wilayah antara Pakistan India, dan hal yang lainnya.

Jika aktor dari permasalahan ini adalah negara, maka permasalahan yang terjadi ini pun tidak terlepas dari keinginan negara untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan suatu negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.

Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision making*) sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan, bahkan setiap politik luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional itu (Rudy 2002, hlm.116-118).

Jadi *Power Politics* akan mempengaruhi perilaku dalam proses interaksi yang terjadi. Berangkat dari sedikit penjelasan mengenai permasalahan yang akan penulis angkat, ada suatu kutipan dari Napoleon Bonaparte '*Let us be master of the strait for six hours and we will be masters of the world.*' (Abraham 2013, hlm.1). Mari kita menjadi tuan selat selama enam jam, dan kita akan menjadi tuan di dunia. begitu kira kira arti dari penjelasan Napoleon tersebut. Penjelasan dari apa yang dikatakan Napoleon ini adalah keterkaitan antara pentingnya selat dan menguasai kontrol dari selat tersebut akan membuat negara atau apapun yang dapat mengontrolnya akan menjadi penguasa dunia, karena nilai strategis yang ada di selat mempunyai potensi besar dalam menguasai kontrol terhadap dunia.

Terkait dengan hal itu, di wilayah timur tengah ada salah satu selat yang menjadi rute pelayaran dalam perdagangan minyak dunia, dan jika selat tersebut ditutup maka akan ada dampak yang akan terjadi pada dunia sendiri. Seperti krisis minyak dan tentunya harga minyak dunia akan tinggi. Selat strategis ini bernama selat hormuz yang berada di bagian utara Iran dan bagian selatan Oman. Selat yang jalurnya sempit yang membentuk pintu masuk ke Teluk Persia yang menghubungkan Teluk Persia (barat) dan teluk Oman serta Laut Arab (tenggara) (Asghar 2012, hlm.2). Dibagian utara dibentuk oleh garis pantai Iran sedangkan selatan dibatasi oleh Semenanjung Musandam di Oman.



Sumber :Asghar J.V, “ The Geopolitics of the Strait of Hormuz Iran – Oman Relation”,Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 2, No. 4, Winter (2012, hlm. 2)

Gambar 1 Peta Selat Hormuz

Jika dilihat kedalaman selat ini terletak di Semenanjung Musandam dan mengecil ke arah pantai utara Iran dan ini membuat sulit bagi kapal- kapal besar untuk menavigasi dikarenakan bahwa bentuk pintu masuk pada selat ini yang mengecil, dan tentunya lebih tepat akan digunakan oleh – oleh kapal yang berukuran sedang dikarenakan lebar dari selat ini yang lebarnya adalah 21 mil dan dipisahkan dengan zona penyangga berukuran 2 mil. Selain itu jika dipandang secara strategis, di Timur Tengah, Selat Hormuz adalah pusat penghubung yang menghubungkan Laut Mediteranian, Laut Merah, Samudera Hindia , Pasifik dan Atlantik (Homyoun 2005, hlm.61).

Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis dalam transportasi minyak dunia, Negara-negara teluk penghasil minyak seperti Iran, Irak, Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, Hampir 30 % minyak dunia berasal dari negara-negara teluk ini. 715 billion barrels atau 57 % dari cadangan minyak dunia. Selain minyak, Teluk Persia juga penghasil gas alam, terbukti total 45 % cadangan gas dunia ada di negara- negara teluk ini (Cordesman 2007, hlm.2). Betapa besar sumber daya alam yang dimiliki oleh negara- negara teluk tersebut, maka pantaslah negara–negara di teluk sebagai tempat bagi negara – negara di dunia melakukan ekspor dan impor minyak serta gas.Selain itu bagi Iran nilai ekspor minyak sangat penting untuk Iran, memberikan 76% dari pendapatan ekspor dan 62% dari pendapatan pemerintah(Katzman 2012, hlm.1).Sehingga ekspor dan impor minyak sangat penting bagi negara-negara di teluk dan juga bagi Iran itu sendiri. dan jika penutupan selat hormuz itu terjadi maka negara harus mencari cara alternatif untuk lintas atau rute perdagangan minyak dunia tersebut, dan tentunya akan memakan biaya yang lebih mahal .

Terkait mengenai selat hormuz ini, yang menjadi jalur lintas perdagangan minyak dan menjadi jalur strategis di wilayah timur tengah. Pada Desember 2011 sampai Januari 2012, Selat hormuz yang menjadi selat penghubung antara negara-negara penghasil minyak di teluk seperti Bahrain,Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dengan Samudera Hindia akan Ditutup oleh Iran. Pesan ini disampaikan oleh wakil presiden Iran Mohammad Reza Rahimi pada tanggal 28 Desember 2011 ‘sebagai suatu bentuk ancaman pada sanksi yang dikenakan terhadap ekspor minyak Iran oleh negara–negara barat’ (Katzman 2012, hlm.4).pernyataan yang dikeluarkan oleh wakil presiden Iran ini tentu melihat terhadap sanksi–sanksi internasional yang terjadi pada negaranya seperti embargo minyak atau sanksi-sanksi lain bahwa Iran dimata internasional terutama AS dan sekutu menganggap bahwa negara Iran sedang mengembangkan senjata nuklir yang mengancam keamanan dunia.

Di era kepemimpinan Ahmadinejad menjadi presiden Iran , Program nuklir Iran kembali dilanjutkan, ini dinyatakan oleh Ahmadinejad pada sidang umum PBB September 2005, yang pada intinya adalah nuklir Iran adalah untuk tujuan damai atau untuk riset ilmiah, pada tahun 2006 Iran berhasil mengembangkan

teknologi nuklirnya yang berhasil mengayakan uranium ke skala industri, dengan pengayaan 3,6 % yang diperingati sebagai hari energi nuklir(Alcaff 2009, hlm.112). Dan pada Agustus 2009 Iran berencana akan membangun 10 fasilitas nuklir baru dan mengayakan uranium sampai pada 20 %. Bagi Iran bahwa teknologi nuklir merupakan barometer dari suatu pencapaian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebuah negara, sehingga kemandirian suatu negara akan tercapai dengan adanya kemajuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri.(Muhsin 2009, hlm.199).Apa yang diinginkan Iran tentang program nuklir ini tidak berjalan secara lancar, bahwa kecurigaan yang besar terhadap Iran dalam hal kepemilikan senjata nuklir, IAEA, PBB dan Amerika melihat bahwa Iran kurang transparan dalam program energi nuklirnya, tergambar Pada tahun 2006, para pengawas yang berasal dari IAEA melaporkan bahwa Iran telah melakukan pengayaan nuklir dan pemisahan plutonium selama hampir 20 tahun tanpa pemberitahuan kepada badan yang berwenang, seperti IAEA , mengingat bahwa Iran tidak mau bekerjasama dengan Pihak IAEA, Maka Dewan Gubernur badan tersebut membawa persoalan program nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB (Utomo 2013, hlm.2).Ini adalah sanksi yang terjadi terhadap nuklir Iran itu sendiri.

Tabel1 Sanksi PBB terkait program Nuklir Iran

Berbagai Sanksi PBB Kepada Iran Terkait Program Nuklir		
Waktu	Issue	Keterangan
24 September 2005	IAEA mengeluarkan resolusi untuk membawa isu nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB	
5 April 2006	Resolusi DK PBB	Meminta Iran untuk dalam waktu 30 hari menghentikan program nuklirnya dan memperbolehkan IAEA untuk melakukan inspeksi
31 Juli 2006	Resolusi DK PBB No 1696/2006	Meminta Iran untuk dalam waktu satu bulan menghentikan program nuklirnya

atau akan dikenai embargo ekonomi

2006	Resolusi DK PBB No 1737/2006	Melarang negara-negara untuk membantu atau menjual alat atau bahan atau teknologi yang memungkinkan digunakan Iran untuk menjalankan program nuklir
2007	Resolusi DK PBB No 1747/2007	Pembekuan aset-aset berharga Iran dan sanksi bagi personal atau negara yang membantu pengembangan nuklir Iran
2008	Resolusi DK PBB No 1803/2008	Memerintahkan Iran untuk secepatnya menghentikan pengayaan uranium serta riset-riset tentang uranium
Juni 2010	Resolusi DK PBB No 1929/2010	Memperketat sanksi dalam bidang perdagangan, finansial dan investasi terhadap industri minyak dan gas

Sumber :Media Kompas pembahasan mengenai konflik Amerika Vs Iran .

Pada November 2011, IAEA mengeluarkan laporan mengenai program nuklir Iran, bahwa kemajuan program nuklir Iran telah sampai pada tahap kemampuan membuat hulu ledak untuk rudal nuklir. Iran diminta menghentikan program nuklirnya atau akan dijatuhkan embargo terhadap ekspor minyak Iran.(Ipoel Misbach 2013, hlm1).Pada tahun 2009, tidak banyak membawa hasil. Iran menolak menyerahkan bahan-bahan uranium ke pihak barat.selain itu pada perundingan terakhir, yang diadakan di Istanbul, Turki pada bulan Januari 2011 juga tidak membawa hasil.

Iran mengajukan agenda perundingan yang ditolak partner rundingnya, seperti AS dan UE karena menyangkut perlucutan senjata global, persenjataan Israel dan pangkalan militer AS. Sedangkan AS dan sekutunya mengajukan agenda perundingan mengenai pengayaan uranium Iran. Pemerintah Iran selalu menyatakan bahwa program nuklir negaranya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan energi domestik. Iran menganggap bebas untuk mengembangkan program nuklirnya serta tanpa campur tangan asing (Utomo 2013, hlm.3). Tidak

ada tanda kesepakatan yang terjalin antara keduanya, sikap ini juga ditunjukkan oleh AS dan Iran dalam panasnya politik terhadap aksi pelucutan senjata nuklir Iran ini, AS mengatakan tidak akan segan-segan menggunakan jalur militer untuk melucuti program nuklir Iran ini dan menyatakan akan menjadikan dirinya sebagai penghalang dalam program nuklir Iran ini. Dan pernyataan ini di respon oleh Muhammad Baqar Dzul Qadr sebagai wakil panglima Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran

Jika AS ingin menyerang Iran , maka dia harus tahu bahwa Iran tidak memiliki batas pertahanan, sehingga kami mampu menyerang musuh kapan saja dengan ditambah bahwa Iran mempunyai 10 juta relawan yang siap gugur untuk memerangi AS (El-Gogary 2006, hlm.173).

Keresahan sanksi selalu saja membuat Iran merasa tidak dihormati, sehingga dalam hal ini sanksi –sanksi Internasional yang dijatuhkan terhadap Iran merasakehilangankepentingan nasionalnya. Dan pada tanggal 28 Desember 2011 oleh wakil presiden Iran menyatakan akan menutup selat hormuz sebagai bentuk ancaman terhadap sanksi-sanksi terhadap Iran tersebut.

Latihan Angkatan Laut Iran pada 23 Desember 2011 sampai 2 Januari 2012 ini memuncak pada uji coba rudal Iran di perairan teluk tersebut. ditambahkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Iran Laksamana Habibollah Sayari mengatakan menutup selat tersebut adalah hal yang mudah. 'Menutup selat hormuz lebih mudah dibandingkan meminum segelas air',Kata Laksamana Sayari kepada stasiun televisi Iran Press TV(Islamedia.com 2012, hlm.1).Dan ditambahkan juga olehDubes Iran untuk PBB melalui televisi Amerika, yaitu Muhammad Khazee

Semua pilihan akan dibahas diatas mejaJika Iran terancam maka jalur itu akan ditutup. Tidak ada keputusan untuk memblokir dan menutup selat hormuz kecuali Iran terancam serius dan seseorang ingin mengencangkan simpulnya, kata Khazae di acara Charlie Rose (ed. Patnistik 2012, hlm.1).

Hampir setiap 10 menit sekali satu kapal tanker melewati selat tersebut dan sekitar 90 persen ekspor minyak negara-negara Arab di teluk, Irak, dan Iran melalui jalur selat hormuz yang menurut kajian lembaga energi AS, Menurut Liauw (2013, hlm.1) diprediksi volume ekspor minyak yang melalui selat hormuz bisa mencapai 35 juta barrel setiap hari pada tahun 2020.

Dan dengan hal ini AS merespon ancaman Iran untuk menutup selat hormuz tersebut dengan adanya 3 surat yang diberikan oleh AS kepada juru bicara

Kementerian Luar Negeri Iran Ramin Menhparast kepada Iran melalui 3 saluran. Pertama, AS mengirim surat melalui presiden Irak Jalal Talabani, lalu Duta Besar AS untuk PBB Susan Rice menyampaikan surat kedua kepada utusan Iran di PBB Mohammad Khazaei. Dan yang terakhir, atau surat ketiga dikirim kepada Iran melalui Duta Besar Swiss untuk Teheran Livi Leu Agosti. Ditujukan kepada pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatullah Khomeini. Berisikan bahwa AS memperingatkan penutupan Selat tersebut akan membawa Iran melewati garis merah dan tindakan itu akan memicu reaksi (pelitaonline.com 2012, hlm.1). dan reaksi yang terjadi adalah AS tidak segan-segan untuk melakukan penyerangan terhadap Iran jika selat strategis ini benar benar ditutup oleh Iran.

Selain itu pada tanggal 3 Januari 2012 kapal induk USS. John Stennis yang dimiliki oleh AS di perairan teluk di peringatkan oleh komandan reguler Iran Atollah Salehi agar Amerika menarik kembali kapalnya tersebut di perairan teluk (Katzman 2012, hlm.1). Dan pada tanggal 22 Januari 2012 AS mengirimkan Kapal USS Abraham Lincoln untuk melakukan misi keamanan di selat hormuz dengan perjalanan reguler yang dilakukan di selat hormuz dan kapal induk yang bisa membawa 80 pesawat terbang dan helikopter itu dikawal kapal pembawa rudal USS Cape St George dan dua kapal perusak bersama dengan kapal Perancis dan Inggris. Sebagaimana Menteri Pertahanan AS Leon Paneeta berulang kali mengatakan, penutupan selat sama halnya dengan tindakan berbahaya. dan saat ini dua dari 11 kapal induk AS berada di kawasan itu. (Kistyarini 2012, hlm.1). Melihat hal ini terlihat bahwa AS memberikan respon dengan apa yang diinginkan Iran untuk menutup Selat Hormuz ini.

Setiap negara yang merasa dirinya terancam, maka negara punya *Rational Choice* dalam setiap ancaman yang datang. merasa tertekan membuat Negara harus punya cara untuk keluar dari tekanan tersebut. begitujuga tekanan yang selalu mengarah kepada kepentingan negara dalam hal kepentingan nasionalnya, itu pun akan terjadi dengan Iran yang notabene sebagai negara berdaulat yang juga memiliki kepentingan nasional dalam melepaskan sanksi –sanksi yang terjadi pada negaranya.

Seperti yang diketahui, bahwa Iran adalah adalah negara yang strategis, karena dilihat dari aspek geografi wilayah Iran yang sangat baik, yang terletak di

kawasan Eurasia, dimana Iran bisa dikatakan dengan “ Menara Pengintai “ antara barat dan timur, serta menjadi benteng pertahanan bagi barat dan timur. Sehingga setiap kali kekuatan barat ingin menyerang ke timur, dan begitupun sebaliknya, maka Iran berada di garis depan dalam konteks geografi tersebut. Dan ditambah dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah kawasan timur tengah tersebut dari gas dan minyak.

Sudah bukan rahasia jika Iran adalah kawasan yang sangat penting dimana interaksi negara baik ekspor minyak dan pipa gas melewati wilayah tersebut, dan ditambah dengan selat strategis yang dikontrol oleh Iran, yaitu selat hormuz, yang menjadi jalur perdagangan minyak di negara-negara penghasil minyak di teluk. Yang terpenting Iran mempunyai hak untuk menutup selat hormuz tersebut, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh analis politik Iran, Hussein Shariatmadari, ‘mengklaim Iran memiliki hak secara hukum menutup Selat Hormuz, baik sementara maupun permanen berdasarkan kesepakatan Geneva tahun 1958 dan kesepakatan Jamaika tahun 1982’ (Rahman 2012, hlm.1).

Penulis menyimpulkan bahwa apa yang terlihat dari selat hormuz ini adalah bagian yang penting dalam rute pelayaran dan ekspor minyak oleh negara- negara teluk kepada dunia, dan tentunya Iran yang mempunyai kontrol terhadap selat tersebut akan selalu mendapatkan tekanan baik bersifat diplomasi, maupun bersifat pengerahan militer oleh negara-negara yang berkepentingan akan minyak di kawasan timur tengah tersebut, dan jika penutupan selat hormuz itu benar-benar terjadi, maka akan ada ancaman yang akan datang terhadap Iran, dan apa yang harus dilakukan Iran dengan mempertahankan kontrol mereka di selat tersebut, sedangkan AS dan negara-negara barat juga bersiap-siap dengan kapal perangnya di selat tersebut. Akankah selat ini benar-benar ditutup atau hanya suatu langkah strategi yang dilakukan Iran untuk bisa melemahkan tekanan internasional yang datang kepada negaranya dan bagaimana Iran melakukan strategi untuk membendung AS di selat hormuz. Sehingga penulis menganggap masalah ini menjadi kasus yang penting untuk dibahas dan dijadikan tambahan wawasan bagi penulis sendiri.

I.2 Rumusan Permasalahan

Permasalahan mengenai penutupan selat hormuz ini menjadi sesuatu yang sangat penting terletak pada seberapa pentingnya selat ini sebagai suatu jalur lalu lintas perdagangan minyak dunia dan sebagai kontrol bagi Iran sendiri. Terkait konteks ini serta latar belakang yang terjadi, maka perumusan masalah yang penulis angkat adalah “ **Bagaimana Strategi Kebijakan Pertahanan Iran di Selat Hormuz dalam Menghadapi Amerika Serikat periode 2011- 2012 “ ?**

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk memahami kepentingan AS terhadap jalur lintas perdagangan minyak tersebut.
- b. Untuk memahami kondisigeopolitik yang terjadi di selat hormuz.
- c. Untuk memahami Strategi Kebijakan Pertahanan yang dilakukan Iran dalam menghadapi AS di selat hormuz periode 2011 -2012

I.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis manfaat penelitian ini adalah untuk memahami kondisi geopolitik di selat hormuz serta kepentingan yang ada di dalamnya serta memahami strategi kebijakan pertahanan Iran dalam membendung kekuatan AS dan sekutu di selat hormuz.
- b. Secara praktis, penulis ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi Disiplin Ilmu Hubungan Internasional terutama pada kajian timur tengah.

I.5 Tinjauan Pustaka

Geografis wilayah di timur tengah ini, danselat hormuz itu sendiri menjadi bagian dari strategis bagi negara untuk melakukan impor minyak dari timur tengah ke negara barat, terutama AS yang juga membutuhkan suplai minyak dari negara- negara di timur tengah seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak maupun Iran yang menjadi penyuplai terbesar minyak dunia. sebesar 40 % minyak dunia berasal dari negara-negara teluk ini, dan hampir setiap 10 menit sekali satu kapal tanker melewati selat tersebut dan sekitar 90 persen ekspor minyak negara-negara Arab teluk, Irak, dan Iran melalui jalur selat

hormuz(Liauw 2013, hlm.1). Dan jika selat ini ditutup, apa yang akan terjadi dengan rute minyak ini ?.

Keputusan Iran untuk berkeinginan dalam menutup selat hormuz mengundang respon bagi negara-negara barat, baik Inggris, Prancis dan terutama AS sendiri. Di tahun 2011 penggelaran pelatihan militer Iran di selat tersebut, juga mendapatkan respon dari AS dengan mengirimkan kapal induknya ke selat hormuz. Di dalam masalah ini, apakah akan terjadi penutupan selat hormuz seperti yang di inginkan oleh Iran, atau akan terjadi konflik di selat tersebut antara Iran dengan AS, ini yang membuat penulis tertarik untuk melihat fenomena geografis selat hormuz ini dalam strategi kebijakan pertahanan Iran dalam menghadapi AS di selat strategis ini. Didalam konteks ini juga penulis menggunakan sumber data baik bersifat buku maupun jurnal yang menjadi pedoman penulis untuk dapat menemukan jawaban dari pertanyaan yang muncul dari pemikiran penulis sendiri.

Jakub J.Grygeil, *Great Powers and Geopolitical Change*, The Johns Hopkins University Press, *Baltimore*, 2006. Buku ini menjelaskan mengenai geopolitik dan geostrategi ,yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai geopolitik dan geostrategis itu sendiri. Objek yang diambil juga adalah kasus sejarah Venesia, Kekaisaran Ottoman, dan Ming China kira-kira abad kesebelas dan keenam belas. Selain itu tujuan dari buku ini adalah untuk melihat kembali konteks geografi dalam Hubungan Internasional dan terutama melihat bagaimana pentingnya suatu Kebijakan Luar Negeri yang diambil di dasari dari suatu geopolitik tersebut.

Gyrgeil mengatakan bahwa konteks geografi itu penting, dinilai dari bagaimana AS bisa memegang kekuasaannya di laut, di gunung, dan didataran, dimana keberhasilan mereka dapat dinilai dari bagaimana mereka dapat menyesuaikan suatu Kebijakan Luar Negeri mereka dengan situasi geopolitik yang mendasarinya. Disini Gyrgeil menguraikan tiga variabel antara geografi, geopolitik, dan geostrategis. Gyrgeil berargumen bertumpu pada geopolitik dan geostrategis ini, Ketika negara memperhitungkan situasi geopolitik dan geostrategis, dan mengejar hal itu, dan ketika mereka menguasai sumberdaya dan jalur komunikasi, maka mereka meningkatkan dan mempertahankan posisi

kekuatan mereka. Dan ketika negara ini gagal dalam memperluas kontrol terhadap sumberdaya dan rute tersebut, maka akan ada negara lain yang akan mengisi kekosongan mereka yang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya dan jalur tersebut. Sehingga ini menjadi buku yang akan mencoba menjelaskan mengenai geografi, geopolitik, dan geostrategis.

Carlos Pascual, *The Geopolitics Of Energy : From Security to Survival* : Brooking Institution, 2009. Energi menjadi peran penting sejak revolusi industri, sehingga dengan itu energi akan menjadi faktor pendorong dalam menciptakan suatu kemakmuran dan keamanan global, sehingga politik energi akan menjadi penentu dalam kelangsungan hidup suatu negara. Krisis energi akan menimbulkan suatu protes, sama halnya dengan minyak. sistem transportasi yang ada di AS bergantung terhadap minyak, dan ini tentunya akan membuat negara untuk memasok dan mencari akses keberadaan energi tersebut. China dan India memerlukan akses ke energi tersebut untuk pertumbuhan berkelanjutan, selain itu untuk mengangkat negaranya keluar dari kemiskinan, serta untuk mengimbangi populasi berkembang. Sehingga energi bukan hanya untuk kelangsungan kehidupan, Tetapi berubah menjadi politik energi dengan menaikkan harga, bersaing untuk menjadi pemasok, dan hal lainnya untuk suatu kepentingan politik.

Di dalam artikel ini menjelaskan tentang bagaimana minyak menjadi suatu yang sangat penting sehingga menjadikan minyak sebagai suatu politik energi, dengan mempunyai persediaan minyak, maka pada saat masa-masa krisis, Penjualan minyak akan menguntungkan bagi si penyedia minyak, Dengan menaikkan harga dan menambahkan kekayaannya dengan hal itu. Inilah peran politik energi yang dimainkan oleh negara-negara pemasok minyak. Seperti penutupan selat hormuz, Tentunya AS akan sulit untuk mendapatkan permintaan minyaknya di timur tengah, Karena jalur yang menjadi penghubung negara ekspor dan impor minyak berada di selat hormuz, sehingga apapun tentunya akan dilakukan oleh AS untuk tidak menutup selat tersebut.

Air Power Journal Vol. 8 no.1 “ Closure of The Strait of Hormuz : Possibilities and Challenges for India” SPRING 2013 (January- March) Demi efektifitas dan jangkauan biaya dalam hal ongkos angkut, maka 80 % dari perdagangan dunia, dan 60 % dari minyak dunia diangkut melalui laut, melalui

jalan raya maritim yang disebut dengan *Sea Lanes of Communication (SLOCs)* yang membantu untuk menghemat waktu, aman bagi kapal dan kargo serta menghemat biaya. Perdagangan dunia melalui Samudera Hindia terutama melalui Selat Hormuz dan Selat Malaka, Namun pasokan minyak mentah dunia ke negara-negara teluk persia melalui selat ini dan ke timur melalui Selat Malaka. Jika tidak melalui selat ini, maka akan ada biaya yang mahal untuk melewati jalur baru dan tentunya akan rentan terhadap keamanan. Seperti Bab El Mandeb di Teluk Aden, yang berdekatan dengan negara gagal, Tentunya akan berhadapan dengan perompak yang berada di sekitar Bab El Mandeb tersebut dalam wilayah Samudera Hindia.

Tidak hanya negara-negara barat, seperti India sangat bergantung terhadap Selat Hormuz tersebut, Negara importir minyak terbesar Keempat ini membutuhkan jalur tersebut demi keamanan nasionalnya, sedangkan memang kemungkinan kecil mengenai penutupan Selat Hormuz ini, Eropa dan AS yang menekan sanksi terhadap program Nuklir Iran berefek terhadap negara India Ini juga. Baru-baru ini di bulan Agustus 2013 Iran menangkap kapal tanker milik India yang masuk ke perairan teluk dengan penuduhan pencemaran perairan teluk (ed. Saputra2013, hlm.1).Di dalam jurnal ini bagaimana Selat Hormuz menjadi suatu yang akan menjadi ancaman dengan penutupannya, Syarat dengan strategisnya jalur tersebut, ladang minyak, dan India juga akan terancam dengan importir minyak ke negara- negara teluk tersebut, Iran dalam konteks regional, akan berhadapan dengan UAE atas kepemilikan tiga pulau di Selat Hormuz tersebut, diantaranya Pulau Abu Musa yang juga merupakan potensi minyak, dan Iran akan berhadapan dengan AS dengan status konflik yang berada di selat tersebut dan konteks sejarah dua negara tersebut. Buku yang memberikan gambaran analisa mengenai penutupan Selat Hormuz terhadap Iran dan Potensi Minyak yang berada di dalamnya.

Congressional Research Service : *Iran's Threat to the Strait of Hormuz*, 23 Januari 2013. Laporan ini menjelaskan bagaimana ancaman Iran di selat Hormuz, Serta menganalisa skenario potensial AS mengenai konflik internasional dengan Iran. artikel ini melihat beberapa kemungkinan dari Iran itu sendiri dalam kontrol di selat hormuz dikarenakan oleh adanya sanksi yang terlalu banyak diberikan

kepada Iran termasuk ekspor minyak Iran dan energi nuklirnya. Potensi ketegangan pasar akan meningkat oleh Iran dan akan ada potensi konflik di Timur Tengah itu sendiri, Selain itu skenario dalam artikel ini mencakup :

- a. *Outright Closure* / Penutupan secara langsung, ini akan menjadi gangguan sendiri oleh pasar minyak dunia jika penutupan ini benar benar terjadi. Ini akan dilakukan Iran jika benar – benar tidak ada negara mengimpor minyak terhadap Iran dan tentunya ini akan mengundang aksi militer di kawasan selat tersebut.
- b. Penghancuran Infrastruktur . Iran bisa mengganggu lalu lintas kapal tanker melalui selat dengan berbagai tindakan tanpa harus mematikan semua lalu lintas, ini terjadi pada perang Irak- Iran 1980-an. Dan tentunya infrastruktur dan produksi energi yang penting bisa dirusak oleh militer Iran dan tentunya akan membuat pasar ekspor minyak di teluk persia akan lebih rendah dan harga minyak akan lebih tinggi.
- c. Ancaman Lanjutan. Iran bisa saja memberikan ancaman lanjutan tanpa melakukan tindakan, ini bisa meningkatkan ketegangan, dan ini akan menjadi respon serius bagi peserta pasar minyak dunia, dan mengundang potensi ketegangan lanjutan.

Dan dengan ini Iran akan melanjutkan pembicaraan dengan enam negara mengenai langkah- langkah yang bisa menjamin bahwa nuklir Iran adalah tujuan damai dan melepaskan sanksi ekonomi yang dilakukan negara barat terhadap Iran. lebih tepatnya kepada kontrol Iran terhadap Selat Hormuz ini.

Martin wahslich, “ *The Iran- US dispute, The Strait of Hormuz, and International Law*”, The Yale Journal of International Law, Spring 2012 Jurnal ini menjelaskan bagaimana sengketa yang terjadi antara AS dan Iran, serta yang terjadi di Selat Hormuz sekarang yang saling bertentangan dalam hukum internasional, Sengketa hukum antara Iran dan AS mengenai hak navigasi maritim internasional masih menjadi isu yang menjadi perdebatan selama penyusunan UNCLOS. Setelah Iran menandatangani konvensi hukum laut 1982, Iran mengajukan pendapatnya mengenai pemahaman hukum laut untuk mengklarifikasi ketentuan tertentu mengenai selat. Pertama, Hak lintas transit melalui selat internasional hanya hak bagi negara yang menandatangani UNCLOS

yang berhak mendapatkan keuntungan tersebut. Kedua, Hak negara pantai untuk mengadopsi hukum dan peraturan untuk kepentingan keamanannya menjadi syarat otorisasi sebelumnya dengan kapal perang. Oman, Yaman dan Mesir telah membuat deklarasi yang setara. Ini mengacu terhadap integritas teritorial dan ancaman kedaulatan negara setelah pada perang dunia kedua diduduki oleh Inggris dan Rusia. Pemahaman yang diberikan Iran ini berdasarkan kepada hak-hak liberal universal navigasi yang seimbang dalam UNCLOS kepada negara-negara pesisir terhadap sumberdaya laut.

Sedangkan AS menolak tentang pembatasan hak Navigasi Maritim, menurutnya, Selat maritim adalah jalur air internasional, yang tidak dapat dihalangi atau ditunda. Pada tahun 2012 Departemen Luar Negeri AS yang memprotes tentang Undang – Undang Kelautan Iran yang tidak mempunyai hak untuk mengatur lintas–lintas transit. Dan justru menurut AS sendiri hak lintas transit harus dibatasi untuk meminimalisir konflik. Dan sebaliknya, Negara-negara pesisir akan menjadi politik bagi “*gate keeper* “/ penjaga gerbang.

Jurnal ini melihat bahwa perspektif AS dan Iran akan berbanding terbalik jika dilihat dari hukum yang mengaturnya, sehingga dengan hukumpun Iran dan AS belum tentu menemui solusi dalam perundingannya, sehingga hukum ini seharusnya lebih mempunyai perjanjian yang tegas mengenai hak navigasi maritim ini.

I.6 Kerangka Pemikiran

Dalam melihat permasalahan terkait mengenai geopolitik dan geostrategis Iran di kawasan Selat Hormuz dalam menghadapi AS, Maka penulis menggunakan konsep dan teori sebagai berikut :

- a. Konsep Geopolitik
- b. Konsep Strategi
- c. Teori Kebijakan Pertahanan

I.6.1 Konsep Geopolitik

Berbicara mengenai konsep dari geopolitik ini, maka ada baiknya penulis memberikan definisi mengenai konsep ini terlebih dahulu. Geopolitik adalah

faktor manusia dari ruang lingkup geografi tersebut, adalah bentuk dari distribusi geografis pada pusat sumber daya dan jalur komunikasi yang memberikan nilai lokasi terhadap kepentingan strategis mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa geopolitik adalah hasil interaksi dari teknologi dan geografi yang mengubahnya menjadi kepentingan ekonomi, politik dan menjadi lokasi yang strategis. Atau dapat dikatakan bahwa geopolitik adalah wajah dunia pada masing-masing negara, seperti dimana lingkungannya/ letaknya, Dan bagaimana responnya suatu negara, dan bagaimana negara harus bertindak. Realitas geopolitiknya adalah bagaimana tindak lanjut terhadap sumberdaya ekonomi dan alam yang mereka miliki untuk kepentingan negaranya dan menjadi kebijakan luar negeri negara. seperti yang dikatakan Gyrgail mengenai definisi singkat geopolitik

geopolitics is an objective reality, independent of state wishes and interests, that is determined by routes and centers of resources(Gyrgail 2006, p.24). Dan selain itu Gyrgail juga mengatakan *that in order to discover the geopolitical reality it is necessary to look at the location of resources (distribution of power) and the lines of communication linking them(Gyrgail 2006, p.26).*

Jalur yang menghubungkan antar negara, yang menjadi hubungan dalam bentuk pertukaran komersial, bentrokan militer, dan pertukaran informasi yang dimana semuanya mengalir dari saluran geografi dan teknologi, dan tentunya pertukaran informasi ini berbasis dilaut dibandingkan dengan daratan. Ini akan menjadi pemahaman mengenai realitas geopolitik dan merumuskan geostrategis. Kata kunci dari geopolitik adalah bagaimana geopolitik yang menghubungkan antara teknologi dan geografi serta faktor manusia di dalamnya dalam melihat kondisi sumberdaya dan rute, yang pada akhirnya melahirkan kepentingan ekonomi, politik, dan strategi. Sehingga dengan adanya kepentingan ini, maka geopolitik akan membentuk hubungan antara geografi – politik – kebijakan agar negara tidak kehilangan kontrol terhadap pusat sumber daya dan jalur komunikasi tersebut.

Dan oleh karena itu walaupun ada perubahan perubahan geopolitik yang terjadi, Negara juga harus bisa melakukan perubahan dari kebijakan luar negerinya agar tetap dapat mengontrol sumberdaya dan jalur komunikasi itu sendiri, Jika tidak negara akan mengalami kemunduran dan kehilangan pengaruhnya terhadap negara–negara lain. Maka dari hal itu semua, Negara harus menciptakan strategi

dalam melindungi geopolitiknya dalam bentuk suatu kebijakan yang dikeluarkan untuk tetap dapat mengontrol kepentingan- kepentingan geopolitiknya. Sehingga strategi akan menentukan negara akan tetap dapat mempertahankan kontrol terhadap geopolitik suatu negara.

I.6.2 Konsep Strategi

Dimulai dari apa yang dikatakan Carlos Van Clausewitz '*Everything in Strategy is very simple, but that does not mean that everything is very easy*' (gray 1999, p.16). Segala sesuatu didalam strategi sangat sederhana, tapi tidak dimaksudkan segala sesuatu itu adalah sangat mudah. Hubungan Kunci antara *Policy, Strategy and tactics* adalah sederhana dan dapat dinyatakan dalam istilah yang sederhana.

Defenisi Strategi dalam buku Colin gray yang dikemukakan Clausewitz '*Strategy is the bridge the relates military power to political purpose*' bahwa strategi adalah suatu hal yang menjembatani antara hubungan kekuatan militer untuk tujuan politik, dan sedangkan colin mengartikannya mengenai strategi itu adalah '*by I mean the use that is made of force and the threat of force for the ends of policy*' (gray 1999, p.17). Strategi juga harus menggunakan paksaan dan ancaman untuk tujuan kebijakannya. Dari hal ini strategi diartikan sebagai alat untuk mencapai suatu kepentingan politik suatu pihak.

Clausewitz tells us that strategy is the use of tacit and explicit threats, as well as of actual battles and campaigns to advance political purpose and the strategy may not be military strategy, it maybe grand strategy that uses 'engagements' (gray 1999, p.18).

Bahwa strategi digunakan baik dengan ancaman diam diam atau dengan ancaman yang jelas. Yang pada intinya bahwa strategi digunakan untuk memajukan tujuan politik, mungkin tidak dengan cara strategi militer, tetapi strategi akan tetap terlibat didalamnya.

Pada intinya kesimpulannya adalah bahwa strategi adalah jembatan yang menghubungkan antara kekuatan militer dengan tujuan politik, dimana tujuan politik akan tertuang didalam suatu kebijakan. dimana penggunaan strategi itu baik berdasarkan ancaman maupun paksaan, dan baik secara ancaman yang sifatnya diam-diam atau dengan ancaman yang jelas. Strategi itu adalah alat untuk memajukan politik, Walaupun tidak dengan strategi militer, Tetapi strategi akan

tetap ada didalamnya. Dimana strategi ini adalah terkait dengan konteks geografis, darat, laut, udara maupun *cyberspace*, dimana dalam pelaksanaannya akan melihat dimensi-dimensi dalam strategi itu sendiri baik itu moral, physical, mathematical, geographical dan statistical yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

I.6.3 Teori Kebijakan Pertahanan

Carl von Clausewitz declared that war was a continuation of politics by other means. Even when we are not engaged in war, politicians should be aware that the defence choices they make will have political consequences(Laura & Teri 2006, p.39).

Carl von Clausewitz menyatakan bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Bahkan ketika kita tidak terlibat dalam perang, Politisi harus menyadari bahwa pilihan pertahanan yang mereka buat akan memiliki konsekuensi politik. Dua pertanyaan kunci dari kebijakan pertahanan adalah apa yang kita bela, dan mengapa kita mempertahankannya ?. Kebijakan pertahanan ini ada karena adanya kepentingan nasional dalam setiap negara, Bahwa pembentukan kebijakan nasional adalah kepentingan nasional yang menjadi pelopor dari artikulasi kebijakan luar negeri, keamanan dan pertahanan. Dan ketika negara tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai kepentingan nasionalnya maka itu adalah suatu penyebab meningkatnya ketidakamanan (Chuter dalam Laura & Teri 2006, hlm.33).

Pada hakikatnya pemerintah dipilih untuk dapat menjaga dan mempertahankan dan membuat suatu sistem perumusan kebijakan pertahanan yang baik dan bagaimana implementasinya. Dan bagian dari kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan pertahanan dimana pemerintah mempertahankan kepentingan nasional negara tersebut.

Dalam hal menjalankan tugasnya pemerintah akan memiliki organisasi yang baik, Karena negara dengan organisasi yang baik akan mendapatkan pelayanan pertahanan dengan baik pula, contohnya seperti kepolisian, layanan penjara, layanan bea cukai, pelayanan kesehatan, serta guru, petugas pemadam kebakaran, dan sejumlah spesialis dan PNS yang akan membantu mempertahankan dan merumuskan serta melaksanakan suatu kebijakan tersebut. Dan kita akan melihat

bentuk kekuatan pertahanan suatu negara tersebut, mereka adalah eksekutif negara, dimana eksekutif ini dapat mengubah kebijakan dalam tindakan praktis. Dimana mereka akan memberikan suatu saran atau masukan tentang pembuatan kebijakan tetapi bukan mereka yang membuat kebijakan itu sendiri.

Kebijakan pertahanan adalah suatu garis hirarki di dalam kebijakan pemerintah suatu negara, ini garis dari hirarki tersebut :

- a. *Government Policy* / Kebijakan Pemerintah : dimana ini kebijakan secara Umum
- b. *Foreign and Interior Policy* / Kebijakan Luar Negeri dan Dalam Negeri : pembagian dua arah kebijakan tersebut.
- c. *Security Policy* / Kebijakan Keamanan : diantaranya (Hubungan Politik-Militer dengantetanggadan lain-lain , Kebijakanterhadaporganisasi-organisasi regionaldan PBB, prioritas intelijen, kontrol senjata,non-proliferasi dan rezimperjanjian, Penjaga perdamaian dan partisipasidalam operasimultinasional).
- d. *Defense Policy* / Kebijakan Pertahanan : dari Kebijakan Keamanan inilah lahir kebijakan Pertahanan. Yang dapat diartikan bahwa suatu Keamanan yang ingin dicapai maka Negara membutuhkan Pertahanan dalam memproteksi kepentingan nasionalnya. Dan ini menjadi Hirarki yang sederhana tapi bermanfaat.

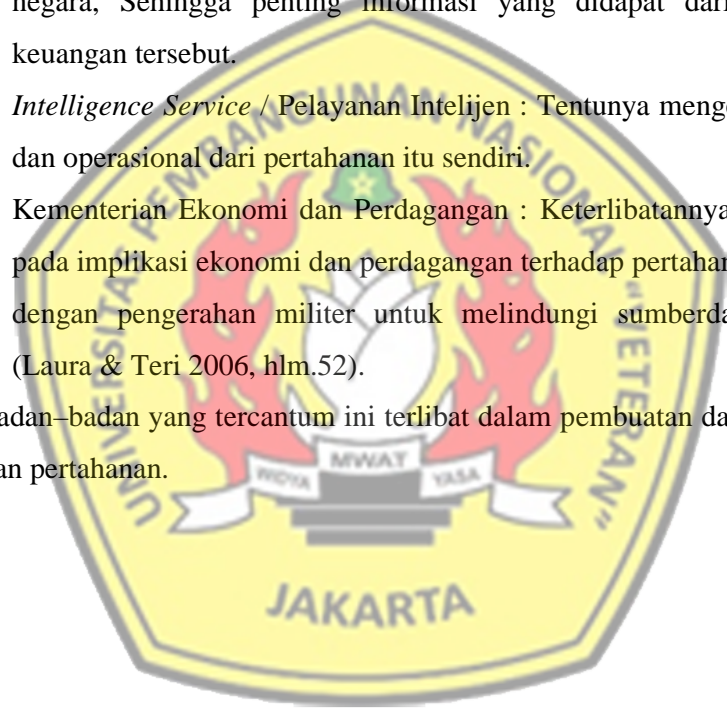
Pengaruh pasukan pertahanan memberikan kontribusi besar terhadap kepentingan nasionalnya, bisa dikatakan “*to fight win wars*” (Huntington 1957, hlm.90).Sehingga pasukan pertahanan akan berperan sebagai suatu proteksi terhadap kepentingan dan perlindungan dari ancaman yang datang terhadap negaranya. dari bagian perumusan kebijakan pertahanan ini maka akan ada beberapa aktor yang terlibat :

- a. Presiden atau Kantor Perdana Menteri : Keputusan besar pertahanan dan keamanan adalah ada pada tingkat ini, dilibatkan pada tahap awal dan mempunyai fungsi sebagai koordinasi umum dalam kebijakan pemerintah.
- b. Kementerian Luar Negeri : Keterlibatan dari badan ini adalah bagaimana adanya hubungan mengenai keamanan regional, Pertanyaan hukum

internasional, Melakukan latihan bersama, dan yang berhubungan dengan konteks pembicaraan dengan hubungan luar negeri seputar pertahanan, sehingga menjadi penting.

- c. Kementerian Dalam Negeri :Keterlibatannya badan ini adalah mengetahui apa yang harus dilakukan mengenai pertahanan di dalam negerinya, Adanya komunikasi dan informasi yang di dapat dari pembuatan pertahanan yang diinginkan.
- d. Kementerian Keuangan : Keterlibatannya adalah anggaran dana yang akan dikeluarkan mengenai pertahanan yang akan dibentuk oleh suatu negara, Sehingga penting informasi yang didapat dari kementerian keuangan tersebut.
- e. *Intelligence Service* / Pelayanan Intelijen : Tentunya mengenai informasi dan operasional dari pertahanan itu sendiri.
- f. Kementerian Ekonomi dan Perdagangan : Keterlibatannya akan terletak pada implikasi ekonomi dan perdagangan terhadap pertahanan itu sendiri, dengan pengerahan militer untuk melindungi sumberdaya yang ada (Laura & Teri 2006, hlm.52).

Badan-badan yang tercantum ini terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan.



I.7 Alur Pemikiran



Sumber : Alur Pemikiran sebagai kerangka untuk menjabarkan poin dari bagian penelitian ini.

Gambar 2 Alur Pemikiran

I.8 Asumsi

Adapun asumsi yang diperoleh dari masalah yang dibahas adalah :

- a. Sanksi yang diberikan terhadap Iran oleh negara barat baik sanksi impor minyak dan program energi nuklir Iran untuk tujuan damai yang dianggap barat akan berujung terhadap bom nuklir membuat Iran semakin tertekan terhadap sanksi tersebut.
- b. Selat Hormuz yang menjadi selat strategis jalur perdagangan minyak maupun gas alam yang adanya impor-ekspor minyak dari negara teluk ke negara dunia menjadi kontrol Iran di kawasan selat tersebut.
- c. Latihan militer yang dilakukan Iran di kawasan Selat Hormuz tersebut memancing respon terhadap Amerika dan negara barat dengan mengirimkan kapal induk AS Abraham Lincoln dan kapal lainnya di sekitar kawasan Selat Hormuz Desember 2011 – Januari 2012.

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif eksplanatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia serta data pendukung dalam menjelaskan masalah yang terjadi.

I.9.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang menjadi bahan pokok pertama atau data yang menjadi sumber asli seperti dokumen resmi sebagai acuan dari masalah atau kasus yang diangkat seperti UNCLOS, *White paper* Iran atau Departemen Pertahanan Iran, sedangkan data sekunder adalah data pendukung, yang dimana data ini didapat dari jurnal, buku, laporan, majalah, berita dan lain –lain yang sudah dicari dan dikumpulkan untuk menjadi data pendukung.

I.9.3 Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan (Library Research) yang diklasifikasi dan dikumpulkan dalam bentuk literatur untuk dijadikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

I.9.4 Teknik Analisa Data.

Data yang didapat kemudian dikelola selanjutnya di analisis secara deskriptif untuk mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian.

I.10 Sistematika Pembabakan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GEOPOLITIK DI SELAT HORMUZ

Bab ini akan menguraikan mengenai penutupan selat hormuz, kepentingan global dan AS terhadap selat tersebut, situasi Iran di negara teluk, kontrol Iran terhadap Selat Hormuz, Dan bagaimana ketegangan yang terjadi antara Iran dan AS sendiri.

BAB III : STRATEGI KEBIJAKAN PERTAHANAN IRAN DALAM MENGHADAPI AS

Bab ini akan berbicara mengenai kebijakan pertahanan Iran, strategi kebijakan pertahanan Iran, Analisa mengenai strategi kebijakan Iran dalam memproteksi kepentingan negaranya dalam menghadapi Amerika Serikat di Selat Hormuz.

BAB IV : PENUTUP

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN